

## Siaran Pers

### **OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2017: TANTANGAN MENGHADAPI RESIKO GLOBAL DAN DOMESTIK**

**JAKARTA** – (8/12) Di tengah perekonomian global yang tengah melambat, Indonesia justru berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hingga triwulan III 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,0 persen (*year on year*), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Dengan adanya penghematan anggaran dan perkembangan ekonomi global dan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diperkirakan mencapai sekitar 5,0 persen. Ekonomi Indonesia pada 2017 diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 5,1 – 5,3 persen. Harga komoditas dan energi yang mulai membaik serta perekonomian global yang mulai pulih diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Namun, pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut akan sangat tergantung juga pada efektivitas kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mitigasi risiko ekonomi ke depan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Dari sisi eksternal, risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia diperkirakan masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Naiknya hutang dan *Non Performing Loan* (NPL) di RRT diperkirakan akan direspons kebijakan yang lebih ketat oleh Indonesia. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi RRT akan melambat. Hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia sebesar 0,03 prosentase poin (pp) di 2016 dan 0,72 pp di 2017 terhadap *baseline*. Dampak terbesar akan melalui jalur investasi yang turun sebesar 1,02 pp. Selanjutnya, aktivitas ekspor impor pun akan melambat seiring dengan besarnya dampak penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok terhadap perekonomian dan perdagangan global.

Risiko eksternal lainnya berasal dari Amerika Serikat (AS), dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Dalam kampanyenya, kebijakan yang ditawarkan Trump bersifat proteksionis. Kekhawatiran akan kebijakan-kebijakan pemerintahan Trump diperkirakan berdampak negatif terhadap tingkat keyakinan pasar, tidak hanya pengusaha atau investor di AS, tetapi di seluruh dunia. Hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan jika Trump menjalankan kebijakan-kebijakan sesuai dengan yang dijanjikan saat kampanye, maka perlambatan ekonomi terjadi tidak hanya di AS, tetapi juga perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan turun sebesar 0,04 pp di tahun 2016 dan 0,41 pp di tahun 2017 terhadap *baseline*. Sumber penurunan terbesar adalah investasi yang turun sebesar 0,89 pp dari *baseline*.

Dari sisi domestik, risiko akan bersumber dari aktivitas sektor swasta yang cenderung masih sangat terbatas, yang diindikasikan dari rendahnya pertumbuhan kredit perbankan. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan kredit perbankan adalah meningkatnya risiko perbankan yang tercermin dari kenaikan NPL yang mencapai 3,10 persen di bulan September 2016. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan akan berdampak negatif pada kinerja investasi. Hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan ketika kenaikan NPL dan penurunan pertumbuhan kredit perbankan terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi di 2016 dan 2017 diperkirakan lebih rendah 0,04 dan 0,34 pp dibandingkan dengan *baseline*. Penurunan pertumbuhan ekonomi didorong turunnya pertumbuhan investasi sebesar 0,15 dan 1,01 pp di tahun 2016 dan 2017.

Risiko domestik berikutnya adalah pola penundaan penyerapan anggaran investasi pemerintah yang akan memberikan risiko terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi dari skenario pola penyerapan secara merata di setiap kuartal. Semakin tertumpuknya penyerapan anggaran investasi pemerintah di akhir tahun, semakin tidak optimal dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena penyerapan yang tertumpuk di akhir tahun, tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan efek pengganda terhadap perekonomian secara optimal pada tahun tersebut.

Efek pengganda dari penyerapan anggaran investasi pemerintah di akhir tahun baru terasa terhadap perekonomian di tahun berikutnya. Perbaikan pola penyerapan anggaran tahun 2017 berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 pp. Perbaikan realisasi anggaran sampai dengan 100 persen dari rencana pun akan dapat membantu perbaikan kinerja ekonomi tahun 2017. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari berbagai risiko ke depan tersebut, Pemerintah Indonesia dapat menjalankan beberapa alternatif kebijakan:

1. Stabilitas politik dan keamanan pada awal tahun 2017 menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah perlu berhati-hati dan mengantisipasi dengan baik gejolak sosial dan politik menjelang masa Pilkada pada tahun 2017.
2. Penurunan suku bunga dasar kredit. Hal ini penting agar transmisi kebijakan moneter berjalan efektif. Penurunan suku bunga kredit akan meningkatkan permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga, karena menurunnya biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi, yang selanjutnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
3. Reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahun 2015 juga diperkirakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak positif tersebut dengan syarat, reformasi struktural tersebut sudah mulai membuahkan hasil, yakni meningkatkan tingkat produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Terkait dengan itu, pemerintah harus secara intensif *me-monitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi struktural supaya terlaksana dengan efektif.
4. Perbaikan pola penyerapan dan tingkat realisasi anggaran infrastruktur. Pola penyerapan anggaran infrastruktur yang merata sepanjang tahun akan memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian. Oleh sebab itu, pola penyerapan anggaran (terutama investasi pemerintah) perlu menjadi perhatian pada tahun 2017, karena penundaan penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun dapat mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari yang diharapkan. Selain itu, realisasi anggaran infrastruktur yang sesuai dengan rencana akan dapat mendorong perekonomian ekonomi secara optimal.
5. Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dan juga regional.
6. Kerjasama Internasional secara bilateral dengan Amerika Serikat, seiring dengan rencana Trump untuk keluar dari NAFTA dan membatalkan TPP. Kecenderungan Trump yang lebih menyukai kerja sama ekonomi secara bilateral merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menjajaki dan membangun perjanjian ekonomi secara bilateral dengan Amerika Serikat.

Melalui langkah antisipasi kebijakan yang tepat, terutama untuk memitigasi dampak risiko ekonomi ke depan, target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Indonesia sangat mungkin dicapai. ■

Jakarta, 8 Desember 2016

Leonard VH Tampubolon  
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon : (021) 319 34259 ext. 3106  
Faksimili : (021) 319 34259  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)